

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
(Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)**

DARSON

**H.Makmur Kambolong,SE.M.Si.
Dra.Suriyani BB,M.Si.**

darson@gmail.com

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS HALU OLEO
KENDARI
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa(ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna).Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan .Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna),dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektifitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. .

KataKunci: Efektivitas ,Pengelolaan Alokasi Dana Desa , Pembangunan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional akan terus dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 demi keadaan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia, serta menimbulkan dorongan dan tuntutan untuk mengadakan modernisasi disegala bidang kehidupan masyarakat khususnya pada pembangunan. Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyusunan rencana pembangunan desa dilakukan berdasarkan prinsip perencanaan dari bawah, dari, oleh dan untuk rakyat. Apabila bantuan tersebut dikelola dengan baik, maka kesejahteraan masyarakat akan lebih terasa dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik yang menjembatani kelangsungan kehidupan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa (ADD).
2. Sebagai salah satu referensi bagi penulis lain, yang akan melakukan penelitian yang sama pada lokasi penelitian yang berbeda.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi.

Menurut The Liang Gie (2002), efektivitas adalah keadaan atau kemampuan suatu kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan hasil guna yang diharapkan. Sedangkan Gibson (dalam Haris, 2015) mengemukakan bahwa efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan.

B. Konsep Pengelolaan

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.”

C. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah dana yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Alokasi dana desa bagian keuangan desa diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten.

D. Konsep Pembangunan

Menurut Aprillia (2014: 1) menyatakan pembangunan merupakan upaya – upaya untuk tercapainya kenaikan kesejahteraan hidup bagi setiao individu maupun masyarkat luas. Aprillia (2014 : 1) mendefinisikan pembangunan sebagai segala upaya yang terus menerus di tujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik , atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik.

Todaro (2000: 20) , mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidemensi yang meliputi perubahan- perubahan struktur sosial , sikap masyarakat , lembaga – lembaga nasional , sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi , pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

E. Efektivitas Pengalokasian Dana Desa (ADD)

Menurut Osborne dan Gaebler (1997), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk masing-masing unit *output*, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas *output* itu. Ketika mengukur efisiensi, harus diketahui berapa banyak biaya yang harus ditanggung untuk mencapai suatu *output* tertentu. Ketika mengukur efektivitas harus diketahui apakah investasi tersebut dapat berguna. Efisiensi dan efektivitas merupakan hal penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, seringkali hanya mengukur tingkat efisiensi saja. Sedangkan Efektivitas pelaksanaan program lazimnya berkaitan dengan upaya pengukuran ataupun penilaian terhadap sejauh mana tercapainya tujuan (Dunn,3003:429).

F. Konsep Anggaran

Anggaran juga dapat diartikan sebagai istilah perencanaan untuk pengendalian laba menyeluruh dapat didefenisikan secara luas sebagai suatu anggaran sistematis dan formal untuk perencanaan, pengkoordinasian dan pengendalian tanggung jawab manajemen (Welsch, 2000).

Menurut Nafarin (2000), “anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang maupun jasa”.

Tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran. Oleh karena itu anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana (Rudianto, 2006).

G. Kerangka Pemikiran

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dapat di lihat dari perencanaan , pelaksanaan , dan pengawasan. (Adisasmita ,2011 :22) .Sedangkan peningkatan pelaksanaan pembangunan menurut Bachtiar Effendi (2002,114) adalah pembangunan fisik dan pembangunan non fisik

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka Lokasi penelitian ini di laksanakan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna yang melaksanakan program Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD). Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan November 2017.

B. Informan Penelitian

Seluruh aparatur Desa Pola beserta masyarakat yang berjumlah 6 orang di tetapkan sebagai informan yaitu terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Ketua BPD
3. Sekertaris Desa
4. Bendahara Desa
5. Masyarakat 2 Orang

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui angket (daftar pertanyaan), wawancara dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkat pembangunan dan juga melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti: Laporan- laporan periodik, laporan tahunan ,dokumen – dokumen dari kantor desa pola , keadaan wilayah penduduk dan tingkat pendidikan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

- a. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan mengamati keadaan ataupun seluruh kegiatan pembangunan Desa Pola seperti pembuatan jembatan , pembuatan dernase , sumur bor , perbaikan mesjid, pembuatan jalan tani dan peningkatan sumber daya manusia .
- b. Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara tanya jawab dan dialog atau diskusi dengan informan yaitu Kepala Desa ,Kepala BPD ,Sekertaris Desa , Bendahara Desa dan Masyarakat tentang kondisi objektif dari perencanaan pembangunan desa pola seperti pembuatan jembatan, pembuatan dernase ,sumur bor , perbaikan mesjid , pembuatan jalan tani dan peningkatan pembangunan sumber daya manusia .

E. Teknik Analisis Data

Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Desa dalam merealisasi keuangan Alokasi Dana Desa untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abbdul Halim,2004).

Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

F. Definisi Konsep

Untuk menjelaskan konsep dalam penelitian ini, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan adalah musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa, diukur dengan jumlah dengan pihak yang berpartisipasi (hadir,dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrembang serta transparasi rencana kepada masyarakat.
2. Pelaksanaan adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi (tenaga atau materi), transparansi informasi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa atau kegiatan kepada masyarakat dan penyelesaian serta capaian tujuan kegiatan.
3. Pengawasan adalah bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah di tentukan.
4. Pembangunan fisik adalah segala bentuk perbaikan atau bentuk pembangunan infrastruktur yang dilakukan di Desa Pola kecamatan Pasir Putih.
5. Pembangunan non fisik atau sosial adalah pembanguan sumber daya manusia , ekonomi, kesehatan , dan pendidikan atau pelatihan .
6. Efektivitas adalah dana penerimaan Alokasi Dana Desa melalui APBDes Di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna yang di ukur dalam juta rupiah selama tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Desa Pola

Penelitian ini dilakukan di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna. Pola adalah sebuah desa kecil yang terletak di Propinsi Sulawesi Tenggara. Desa Pola terletak +/- 21 Km dari Ibu Kota Kabupaten Muna, dan Pola Ibu Kota Kecamatan Pasir Putih dengan luas wilayah 17,07 dari total wilayah Kabupaten Muna, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Wakorumba
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mata Indah
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan Rimba
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut

Desa Pola terdiri dari 2 (dua) dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun memiliki jumlah penduduk sebanyak 920 jiwa, dimana laki-laki berjumlah 403 dan perempuan berjumlah 517, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 232 jiwa. pendidikan masyarakat desa pola masih sangat rendah dimana masyarakat yang tidak sekolah sebanyak 376 orang atau 40,87% tamat SD sebanyak 264 orang atau 28,70%, tamat SMP 71 orang atau 7,72%, SMA 103 atau 11,20%, mahasiswa 65 atau 7,06%, sarjana (S1) sebanyak 38 orang atau 4,13% dan magister (S2) sebanyak 3 orang atau 0,32%.

2. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Pola

Jenis pekerjaan masyarakat Desa Pola masih kurang baik di mana pengangguran berjumlah 301 orang atau 58,10%, Petani berjumlah 108 orang atau 20,85%, Pedagang/jual beli berjumlah 44 orang atau 8,50%, Pegawai Negeri Sipil berjumlah 25 orang atau 4,82%, Nelayan berjumlah 26 orang atau 5,02%, tukang kayu/batu 8 orang atau 1,54%, pensiunan guru/ dosen berjumlah 4 orang atau 0,78% dan pengusaha menengah 2 orang atau 0,38%.

3. Keadaan Kantor Desa Pola

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif dan efisien kedudukan unsur pegawai Desa selaku sumber daya manusia (SDM) memegang peranan penting karena unsur pegawai merupakan pengelola utama segenap rencana dan program kerja organisasi yang akan dilaksanakan.

B. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna

Pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai di implementasikan di Indonesia pada tahun 2005 dengan dasar Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang kini telah di pertegas dengan lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa. Aturan ini mewajibkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat dan di teruskan ke rekening desa yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Rencana kerja pembangunan Desa (RKPDes) dalam pengelolaan alokasi dana desa di bidang pembangunan fisik ada 6 program yaitu pembangunan jalan lingkungan, pengadaan air bersih ,pengadaan tenda jadi, rehab balai Desa, penimbunan lokasi pasar, dan pembangunan MCK. Sedangkan di bidang Pembangunan non fisik ada 5 program yaitu pelatihan kepala Desa dan perangkat, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, pembinaan pemuda dan olahraga, pembinaan organisasi PKK dan pembinaan majelis taklim.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa , mengenai program yang telah di rencanakan apakah dapat terialisasi semua yaitu sebagai berikut :

“ Program yang telah di rencanakan dapat terialisasi semua hanya kurang partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik. ” (Wawancara ,13 November 2017).

2. Pelaksanaan Pengelolaan alokasi Dana

Jumlah anggaran yang digunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp.511.991.000, atau 36,35 %, Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp.832.801.000, atau 59,12 %, Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp.45.500.000, atau 3,23 %, Pembinaan Masyarakat Desa sebesar 18.250.000, atau 1,30 %, Jika kita mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 pasal 100 serta Peraturan Bupati Muna No. 11 Tahun 2017 bahwa ketentuan penggunaan Belanja Desa 70% digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan 30 % digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa , operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan insentif rukun tetangga dan rukun warga. Maka dari itu, pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian perencanaan, dilihat dari musrembang desa yang diadakan pemerintah desa atau tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya masyarakat yang hadir dan sementara masukan rencana kegiatan dari masyarakat pengadaan tenda jadi 1 paket, selain itu rencana kegiatan yang ada, semuanya sudah di tentukan oleh pemerintah desa secara sepihak , dan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Pola kepada masyarakat Desa Pola. Pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Pola masih kurang efektif. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang

mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan dan Pengawasan masih kurang efektif, di mana proses pengawasan tidak berjalan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah Sebagai Pemerintah Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan, dalam melakukan kegiatan musrembang desa, seharusnya meningkatkan keterlibatan masyarakat dan usulan kegiatan itu harus dari masyarakat yang ditentukan di sesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat dalam musrembang dan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Pola kepada masyarakat Desa Pola dan pelaksanaan kegiatan harus melibatkan masyarakat serta transparansi informasi tentang penggunaan anggaran alokasi dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim,2004.*Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Halim,2004.*Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP .
- Adisasmita,S.A.(2011), *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*.Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita,R.(2006) *Pembangunan Pendesaan dan Perkotaan* .Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aprillia ,2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung : Alfabeta
- Ahmadi ,2001. *Ilmu Usaha Tani*, Jakarta : Penebar Swadaya.
- Beratha, I Nyoman , 1992 . *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Devas,1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*,Jakarta : Universitas Indonesia.
- Dunn,William,2003.*Analisis Kebijakan Publik*.Yogyakarta: Gadjah Maja University Press.
- Effendi Bachtiar ,2002. *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan* . Jakarta : Bumi Aksara.
- Gie.The Liang ,2002,*Administrasi Perkantoran Moderen*. Yogyakarta : Liberty

- Gibson(dalam Hariss 2015) *Perilaku Organisasi*, Edisi 16 , Jakarta.
- Griffin, Ricky.W.2004. *Manajemen*. Edisi 7 Jilid 2 .Jakarta: Erlangga.
- Handoko.T.Hani,2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia* .Yogyakarta : BPF
- Hasibuan, Malayu S. P. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi : Jakarta. Bumi Aksara.
- Kartasasmita,Ginandjar, 2001. *Rakyat Pembangunan Untuk : Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*,Jakarta : Pustaka CIDESINDO
- Mardiasmo,2004 . *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta : Andi
- Mahmudi,2005.*Manajemen Kinerja Sektor Publik*.Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Manullng atik& ratminto,2012.*Manajemen pelayanan*,pustaka belajar.Yogyakarta : max saleng
- Nafarin,2000. *Penganggaran Perusahaan* . Edisi Pertama.Jakarta : Salamba Empat.
- Nanang Fattah.2004. *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah* , Bandung : Pustaka Bani Quraisy.
- Osborne dan Gaebler , 1997. *Reinventing Government* , Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11 huruf c.
- Qalyubi Shyhabuddin.2007. *Manajemen Penelitian*.Jakarta.
- Rudianto, 2006.*Akuntansi Manajemen : Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategi* . Jakarta : Grasindo.
- S.P.Siagian,1978. *Manajemen* , Yogyakarta.
- Sutrisno,2007.*Manajemen Keuangan* ,Yogyakarta : Ekonesia.

- Siagian ,2012, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : Haji Mas Agung .
- Soemantri,2011. *Pedeoman Penyelenggara Pemerintah Desa*, Bandung : Fokus Media
- Suparno .2001. *Membangunan Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Suksesi.2007.*Efektifitas Program Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Perekonomian Desa di Kabupaten Pacitan*.Dikutip dalam <http://journalfe.unitomo.ac.id/wp>.
- Terry, George dan Leslie W.Rue ,2010.*Dasar-dasar Manajemen*. Cetakan .11. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Todaro Micheal ,2000.*Pembangunan Ekonomi 2* . Edisi Kelima, Jakarta : PT Bumi Aksara .
- Todaro Michel,2000.*Pembangunan ekonomi di Dunia ke Tiga* , Jakarta : Erlangga.
- Tjokroamidjojo,1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Haji Mas Agung.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Welsch , Hilton, Gordon .2000. *Anggaran Perencanaan dan Pengendalian Laba*. Diterjemahkan oleh Purwatiningsi dan Maudy warouw. Buku Satu. Jakarta : Salamba Empat.
- Widjaja,Haw. 2003. *Otonomi Desa* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Wijayanti, Irine Diana Sari,2008.*Manajemen*, Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Sukanto,Azwardi,*Efektivitas alokasi dana desa dan kemiskinan di provinsi sumtra utara*,Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Muntah anah,siti,*Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas*.Jurnal Ekonomi.